



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL  
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyusunan Peraturan Bupati Bantul, perlu menyusun perencanaan penyusunan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dalam hal terdapat perintah perundang-undangan atau keadaan mendesak untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Bupati di luar Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 5 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;  
dan
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.  
Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL  
TAHUN 2026

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2026

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
1	Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Bersama	a. Penataan Tiang dan Jaringan bawah tanah fiber optic b. Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi c. Izin Pemanfaatan Lahan Jalan Kebupaten, Rekomendasi Insfratruktur Pasif, Rekomendasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Kabupaten d. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pasif	Triwulan II	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dan b. Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Triwulan I	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Kalurahan Inklusi	a. Maksud dan Tujuan Kalurahan Inklusi b. Sasaran Kalurahan Inklusi c. Penyelegaraan Kalurahan Inklusi d. Peran Masyarakat dan Pihak Lain e. Pelaporan f. Penilaian dan Penghargaan g. Pembinaan dan Pengawasan h. Pendanaan	Triwulan IV	Dinas Sosial
4	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Bantul	a. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan b. Rencana Struktur Ruang c. Rencana pola ruang d. ketentuan pemanfaatan Ruang e. Peraturan zonasi f. Kelembagaan	Oktober - Desember	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
5	Pengelolaan Arsip Elektronik	a. Penciptaan Arsip b. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip c. Alih Media (aktif dan inaktif)	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Triwulan I	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
7	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Penambahan materi mengenai penomoran naskah dinas	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	a. Pembatasan Timbulan Sampah b. Pengolahan Sampah c. Tata Cara Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik d. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri e. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri f. Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif bagi Produsen g. Pembentukan PJPS h. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi PJPS i. Kompensasi j. Tata Cara Pemberian Insentif k. Sistem Tanggap Darurat Dalam Situasi Darurat Pengelolaan Sampah l. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Setiap Orang m. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Setiap Orang yang Mengelola Kompleks Perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan khusus atau Tempat umum n. Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Setiap yang Akan Menyelenggarakan kegiatan di tempat umum o. Larangan p. Pembinaan dan pengawasan q. Pendanaan	Triwulan I-II	Dinas Lingkungan Hidup
9	Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul	a. Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul b. Kebijakan, Strategi dan Pengembangan sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul c. Rencana Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Kebupaten Bantul	Triwulan I-II	Dinas Lingkungan Hidup
10	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	a. Ketentuan Umum Terkait BLUD dan Pola Tata Kelola b. Prinsip Tata Kelola BLUD yang Transparan, Akuntabel dan Profesional c. Kedudukan, tugas, fungsi, Serta Kewenangan BLUD UPTD d. Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola BLUD e. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan f. Tata Kerja dan Hubungan Kerja Internal g. Pengelolaan Sumber Daya Manusia h. Pengaturan Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai; serta i. Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Pendukung Pelayanan	Triwulan I-II	Dinas Lingkungan Hidup

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
11	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian, Maksud dan Tujuan Sandar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan</li> <li>b. Jenis dan Ruang Lingkup Pelayanan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan</li> <li>c. Penetapan dan Mutu Standar Pelayanan Minimal Sesuai Standar TTeknis</li> <li>d. Penyelenggaraan, Tanggung Jawab serta Pelaporan pelaksanaan SPM</li> <li>e. Pembinaan, Pengawasan serta Evaluasi Penerapan SPM</li> </ul>	Triwulan I-II	Dinas Lingkungan Hidup
12	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan PertaTahun 2025 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian dan Ruang Lingkup Rencana Strategis BLUD UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertahanan Tahun 2025 - 2029</li> <li>b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPTD Kebersihan, Persamopahan dan Pertamanan sebagai Badan Layanan Umum Daerah</li> <li>c. Muatan Rencana Strategis yang Meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan</li> <li>d. Program dan Kegiatan Pelayanan Kebersihan, Persampahan dan Pertanaman beserta Indikator Kinerja</li> <li>e. Rencana Keuangan dan Pendanaan BLUD Keterkaitan BLUD dengan RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>	Triwulan I-II	Dinas Lingkungan Hidup
13	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Cara Penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Bantul meliputi Pendaftaran, Pengawasan, Pembinaan, Kemitraan, Pengenaan Sanksi Administrasi dan Peran Serta Masyarakat</li> </ul>	Triwulan III	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
14	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bantul meliputi Pendaftaran, Pengawasan, Pemnbinaan, Kemitraan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Peran Serta Masyarakat</li> </ul>	Triwulan IV	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
15	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Umum, Pemutakhiran dan Pendataan, Permohonan Program Pemberdayaan Koperasi, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan Koperasi, Penutup</li> </ul>	Triwulan I	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
16	Hilirisasi Ekonomi Melalui Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Umum, Arah Kebijakan Tujuan dan Strategi, Sistematika Grand Desain Hilirisasi Ekonomi melalui Koperasi, Monitoring Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup</li> </ul>	Triwulan I	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
17	Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul ( <i>Hospital By Laws</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis yang Baik</li> </ul>	Triwulan II	RSUD Panembahan Senopati
18	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumus Fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD terhadap Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kejas sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.</li> </ul>	Triwulan III	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
19	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Terhadap Rincian Jenis Perizinan Nonberusaha</li> </ul>	Triwulan II	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
20	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027	a. Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027 b. Sebagai pedoman dan landasan penyusunan untuk penyusunan dokumen dan kebijakan Tahun 2027 c. Sebagai pedoman PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2027	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027	a. Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2027 b. Tindak lanjut penyusunan RKPD 2027	Penetapan 1 bulan Setelah RKPD 2027	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. Perubahan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 b. Sebagai Pedoman PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD 2026	Triwulan II	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. Perubahan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2026 b. Tindak lanjut penyusunan Perubahan RKPD 2026	Penetapan 1 bulan Setelah RKPD 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Rencana Aksi Satu Data Indonesia	a. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 b. Sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten tiap tahun berjalan	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perubahan pada tahapan penyampaian usulan	Triwulan IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26	Rencana Aksi dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofi Kabupaten Bantul	a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta b. Sebagai arah kebijakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dan membagi peran dan tanggung jawab kepada Perangkat Daerah	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Masterplan Pansela Kabupaten Bantul	Sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan di kawasan Pansela Kabupaten Bantul	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	Pengelolaan Air Minum SPAM Berbasis Masyarakat untuk Peningkatan Akses Air Minum Aman Kabupaten Bantul	Water treatment air minum berbasis pedesaan agar masuk kriteria akses air minum aman	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan	Acuan untuk pelaksanaan KDN Tahun 2026-2030 mengacu pada kajian perhitungan kompensasi dampak negatif TPA Piyungan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY	Triwulan II	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
30	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Mekanisme Pelaksanaan Program TSLP dan Kelembagaannya	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029	Sebagai Acuan dalam Penyelenggaraan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
33	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah	Perubahan Sebagian Pasal	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
34	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Lapangan	Pedoman Pelaksanaan KKN di Kabupaten Bantul	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umu Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-	Rencana Strategis BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	Triwulan I	Dinas Kesehatan
36	Rencana Kontingensi Tsunami	Rencana Kontingensi Bencana Tsunami Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan c. Penyusun dan Pelaksana	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	Rencana Kontingensi Banjir	Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan c. Penyusun dan Pelaksana	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38	Rencana Kontingensi Tanah Longsor	Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
39	Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem	Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan c. Penyusun dan Pelaksana d. Sistematika e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya f. Aktivasi rencana Kontingensi g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana h. Uji Rencana Kontingensi i. Masa Berlaku j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang k. Pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan c. Penyusun dan Pelaksana d. Sistematika e. Hubungan RPKB terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya, termasuk Rencana Kontingensi f. Masa Berlaku g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana h. Pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
41	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	a. Mekanisme dan Tata Cara Kerja Pos Komando Penangan Darurat, Khususnya dalam hal Penerimaan bantuan dari Lembaga Usaha b. Pengawasan Terhadap Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana c. Penyampaian Laporan Pelaksanaan oleh Lembaga Usaha dalam hal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
42	Rencana Kontingensi Kekeringan	Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan c. Penyusun dan Pelaksana d. Sistematika e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya f. Aktivasi rencana Kontingensi g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana h. Uji Rencana Kontingensi i. Masa Berlaku j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang k. Pendanaan	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
43	Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan	Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan c. Penyusun dan Pelaksana d. Sistematika e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya f. Aktivasi rencana Kontingensi g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana h. Uji Rencana Kontingensi i. Masa Berlaku j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang k. Pendanaan	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
44	Rencana Kontingensi Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Rencana Kontingensi Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Bantul yang meliputi: a. definisi-definisi b. Maksud dan Tujuan Penyusunan c. Penyusun dan Pelaksana d. Sistematika e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya f. Aktivasi rencana Kontingensi g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana h. Uji Rencana Kontingensi i. Masa Berlaku j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang k. Pendanaan	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
45	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang meliputi: a. Maksud dan Tujuan b. Ruang Lingkup c. Kewenangan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana d. Prinsip, Kebijakan dan Strategi e. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana f. Pedoman Penetapan Prioritas g. manajemen Penyelenggaraan h. Pendanaan dan i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
46	Rencana Kebakaran dan Penyelamatan	Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang meliputi: a. Definisi - definisi b. Tujuan Penyusunan c. Masa Berlaku d. Penyusun dan Pelaksana e. Sistematika f. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Peninjauan Ulang g. pendanaan	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47	Kalurahan Tangguh Bencana	Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang meliputi: a. Definisi - definisi b. Penyelenggaraan Kalurahan Tangguh Bencana c. Penilaian Kalurahan Tangguh Bencana d. Pemantauan dan Evaluasi Kalurahan Tangguh Bencana dan e. Pendanaan	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
48	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Mengatur mengenai perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2026	Triwulan I	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
49	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2026	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
50	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2026	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
51	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2027	Triwulan IV	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
52	Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	Triwulan III	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
53	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Perubahan ruang lingkup Bosda menjadi Bosda Reguler dan Bosda Khusus	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
54	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul	Perubahan mekanisme penyaluran insentif	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
55	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara	a. Tata cara pemberian bantuan pembiayaan diberikan untuk Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah yang berasal dari keluarga sangat miskin, keluarga miskin, dan keluarga rentan miskin; dan b. pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara.	Triwulan III	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
56	Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah	a. Besaran BKK masing-masing Kalurahan b. Standar Harga barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah c. Mekanisme dan syarat pencairan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
57	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah dan/atau Pengisian Jabatan Lurah	a. Persyaratan b. Mekanisme penetapan c. Mekanisme pencalonan d. Mekanisme pendaftaran e. Tata letak KPPS f. Denah PPS g. Formulir administrasi terkait dengan penghitungan suara, perekapan h. Bentuk, ukuran, warna surat suara i. Ukuran foto di kartu suara j. Format berita acara	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
58	Bentuk formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah	a. Formulir administrasi terkait dengan penghitungan suara, perekapan b. Bentuk, ukuran, warna surat suara c. Ukuran foto di kartu suara d. Format berita acara	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
59	Kompensasi Tanah Kas Kalurahan untuk Fasilitas Pemerintah Daerah	a. Mekanisme pencairan b. Besaran dan kompensasi setiap kalurahan c. Penggunaan tanah kas kalurahan	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
60	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	a. Besaran penghasilan tetap lurah dan pamong b. Besaran tunjangan Bamuskal	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
61	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	a. Struktur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) b. Ketugasan c. Kelengkapan SPJ	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
62	Pembagian Alokasi Dana Desa	a. Mekanisme pencairan b. Indikator dan cara perhitungan ADD setiap Kalurahan c. Besaran masing-masing Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
63	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Kelembagaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
64	Bantuan Keuangan Khusus	Penyesuaian ketentuan baru dalam pemberian Bantuan Keuangan Khusus	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
65	Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan	Penyesuaian Ketentuan baru dalam pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
66	Dana Insentif Kalurahan	Pemberian Bantuan atas Kinerja/Prestasi Kepada Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
67	Pembangunan dan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Penyesuaian Ketentuan baru dalam pemberian BKK PPAM-BM	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
68	Pedoman Pelaksanaan <i>Cash Management System</i> dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan	Mengatur CMS Khusus Untuk Belanja Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
69	Penetapan Batas Kalurahan Bantul	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
70	Penetapan Batas Kalurahan Ringinharjo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
71	Penetapan Batas Kalurahan Palbapang	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
72	Penetapan Batas Kalurahan Sabdodadi	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
73	Penetapan Batas Kalurahan Trirenggo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
74	Penetapan Batas Kalurahan Pendowoharjo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
75	Penetapan Batas Kalurahan Panggungharjo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
76	Penetapan Batas Kalurahan Bangunharjo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
77	Penetapan Batas Kalurahan Timbulharjo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
78	Penetapan Batas Kalurahan Sumberagung	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
79	Penetapan Batas Kalurahan Canden	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
80	Penetapan Batas Kalurahan Trimulyo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
81	Penetapan Batas Kalurahan Patalan	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
82	Penetapan Batas Kalurahan Wukirsari	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
83	Penetapan Batas Kalurahan Imogiri	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
84	Penetapan Batas Kalurahan Girirejo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
85	Penetapan Batas Kalurahan Karangtalun	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
86	Penetapan Batas Kalurahan Karangtengah	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
87	Penetapan Batas Kalurahan Kebonagung	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
88	Penetapan Batas Kalurahan Sriharjo	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
89	Penetapan Batas Kalurahan Selopamioro	a. Titik Batas Kalurahan b. Luas Wilayah Kalurahan c. Penegasan Batas Desa d. Batas Wilayah Kalurahan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
90	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2027	a. Larangan Penggunaan DD b. Sinkronisasi dengan Kegiatan Kabupaten dan Nasional c. Mekanisme Penyusunan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
91	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	a. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung b. Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung c. Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi d. Standar pemanfaatan bangunan gedung e. Standar pembongkaran bangunan gedung f. Standar penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan g. Standar penyelenggaraan bangunan gedung hijau h. Dokumen i. Pengangkatan pegawai non aparatur sipil negara j. Persetujuan bangunan gedung k. Konsultasi perencanaan l. Penerbitan persetujuan bangunan gedung m. Pembuatan duplikat PBG Gedung n. Pembangunan kumpulan bangunan gedung o. Sertifika laik fungsi p. Tata cara sanksi administratif q. Surat bukti kepemilikan bangunan gedung r. Pendataan s. Pengawasan	Triwulan I	DPUPKP

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH